RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

DISUSUN OLEH :

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jln. Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) / Jln. G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya

Telp. (0536) 3242606 – Fax. (0536) 3242606

Email : kesbangpol.pky2019@gmail.com dan Website : kesbangpol.palangkaraya.go.id

WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2;
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

22. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 15);
23. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Uraian terperinci Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 18

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jalan Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) – Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya
Telepon/Faksimile : (0536) 3242606, website/email : kesbangpol@palangkaraya.go.id
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA
Nomor 200.01/389.1/ BKBP/VIII/2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 154 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Palangka Raya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4438);

7. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 (tambahan lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah;

11. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009;

13. Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya;

14. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RENJA Perubahan Tahun 2024, adalah Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang dimulai sejak ditetapkan

KEDUA : RENJA Perubahan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

KETIGA : RENJA Perubahan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024, selanjutnya disebut RKPA Tahun 2024.

KEEMPAT : Uraian terperinci mengenai RENJA Perubahan Tahun 2024 sebagaiman terdapat dalam lampiran Keputusan Ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penyusunan RENJA Perubahan 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada Tanggal : 14 Agustus 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palangka Raya

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BOY YEPTHANIUS, S.E, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720803 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Wali Kota Palangka Raya
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih dan kemurahan-Nya kepada kami semua khususnya kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024. Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini untuk membantu Pj. Kepala Daerah didalam membangun program RPD, Visi dan Misi.

Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati kita semua di segala tugas dan kerja.

Palangka Raya, 14 Agustus 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palangka Raya

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BOY YEPTHANIUS, S.E, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19720803 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 2

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023 3

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 8

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 10

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10

BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH . 18

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 18

3.2 Program dan Kegiatan 18

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

BAB.IV. PENUTUP 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam progam dan kegiatan maupun penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya. Didalamnya terdapat penjabaran visi misi, program dan kegiatan, serta tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kota Palangka Raya, selain daripada itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dilakukan dengan memperhatikan dokumen RKPD Kota Palangka Raya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dengan demikian RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyempurnaan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam tahun yang sama, sehingga diharapkan, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya pada tahun 2024 memiliki sinergitas dengan program serta kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya guna mencapai visi dan misi Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah.

7. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota palangka Raya Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas yang berhasil guna dan berdaya guna.

Tujuan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2024, diarahkan untuk berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kota Palangka Raya dalam segala bidang guna menyiapkan kemandirian masyarakat Kota Palangka Raya, Hal ini berarti antara target dan pencapaian tidak mengalami hambatan berarti. Matriks rekapitulasi evaluasi renja tahun 2023, dapat dilihat pada tabel T-C.29.

Tabel. T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023

TRIWULAN IV

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran tertentu tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
					5	6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp		
		Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	60.00	11,393,652,331	0.00		100	4,331,671,070		711,478,585		1,204,673,233		836,879,976		1,282,596,293		4,037,626,087	0.00%	93.21%	60.00	4,037,626,087		35.47%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0.00	150,000,000	0.00		5	62,814,390	2	5,075,000	1	5,075,000	1	12,375,000	1	40,260,780	5	62,785,780	100.00%	99.95%	5.00	62,785,780	0.00%	46.30%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0.00	150,000,000	0.00		5	62,814,390	2	5,075,000	1	5,075,000	1	12,375,000	1	40,260,780	5	62,785,780	100.00%	99.95%	5.00	62,785,780	0.00%	46.30%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu(*) (%)	0.00	10,073,147,746	0.00		100	2,933,582,727	25	496,341,402	25	875,131,814	25	612,364,646	25	713,164,801	100	2,697,002,663	100.00%	91.96%	100.00	2,697,002,663	0.00%	94.24%		
			Terpenuhinya Administrasi Keuangan (Bulan)	0.00		0.00		12		3		3		3		3		12		100.00%		12.00		0.00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0.00	10,047,147,746	0.00		100	2,919,582,727	100	492,896,602	100	871,557,014	100	609,389,646	100	709,189,701	100	2,682,843,163	100.00%	91.92%	100.00	2,682,843,163	0.00%	26.70%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0.00	26,000,000	0.00		12	15,000,000	3	3,534,800	3	3,574,800	3	3,574,800	3	3,975,100	12	14,659,500	100.00%	99.73%	12.00	14,659,500	0.00%	57.54%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0.00	404,621,251	0.00		12	292,255,340	3	87,279,075	3	48,052,187	3	69,426,650	3	87,328,600	12	292,086,512	100.00%	99.94%	12.00	292,086,512	0.00%	375.85%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	8,994,375	0.00		10	10,000,000	5	4,983,000			5	5,015,000		-	10	9,998,000	100.00%	99.98%	10.00	9,998,000	0.00%	100.64%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	67,000,000	0.00		3	60,000,000	1	25,940,800	1	4,830,000	1	27,139,500	-	2,430,000	3	59,940,300	100.00%	99.90%	3.00	59,940,300	0.00%	89.48%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	42,799,688	0.00		7	29,000,000	1	8,747,000		2,813,000	1	10,855,000	-	6,584,700	2	28,999,700	100.00%	100.00%	2.00	28,999,700	0.00%	67.78%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0.00	13,127,188	0.00		100	7,200,000	25	-	25	1,800,000	25	1,800,000	25	3,600,000	100	7,200,000	100.00%	100.00%	100.00	7,200,000	0.00%	54.85%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	291,700,000	0.00		100	185,955,345	25	47,636,275	25	36,009,187	25	24,617,159	25	74,713,900	100	185,948,512	100.00%	99.94%	100.00	185,948,512	0.00%	63.75%		

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di beli (Paket)	0.00	143,210,844	0.00	-	1	252,500,000	-	-	1	39,909,800	-	-	-	185,100,000	1	225,009,800	100.00%	89.11%	1.00	225,009,800	0.00%	290.06%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	79,763,960	0.00	-	1	227,500,000			1	14,985,000				185,100,000	1	200,085,000	100.00%	87.96%	1.00	200,085,000	0.00%	250.75%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	63,416,875	0.00	-	2	25,000,000		-	2	24,924,800	-	-	-	-	2	24,924,800	100.00%	99.70%	2.00	24,924,800	0.00%	39.30%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0.00	472,938,440	0.00	-	100	649,162,110	25	91,781,108	25	200,920,932	25	117,230,880	25	218,598,312	100	628,531,232	100.00%	96.82%	100.00	628,531,232	0.00%	113.06%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	-	0.00	-	24	97,403,310	6	21,628,454	6	24,486,208	6	22,903,839	6	24,823,307	24	93,841,808	100.00%	96.34%	24.00	93,841,808	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	472,938,440	0.00	-	12	551,758,800	3	70,152,654	3	176,434,724	3	94,327,041	3	193,775,005	12	534,689,424	100.00%	96.91%	12.00	534,689,424	0.00%	113.06%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD (%)	0.00	139,634,050	0.00	-	100	141,356,500	25	31,002,000	25	35,583,500	25	26,882,800	25	38,143,800	100	131,612,100	100.00%	93.11%	100.00	131,612,100	0.00%	174.15%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0.00	120,064,050	0.00	-	7	91,406,500	2	24,778,000	3	24,366,500	1	18,445,800	1	19,148,800	7	86,739,100	100.00%	94.89%	7.00	86,739,100	0.00%	72.24%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	0.00	-	0.00	-	20	25,000,000	5	6,224,000	5	6,224,000	5	3,487,000	5	8,995,000	20	24,930,000	100.00%	99.72%	20.00	24,930,000	0.00%	0.00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	0.00	19,570,000	0.00	-	1	24,950,000		-	1	4,993,000	-	4,950,000		10,000,000	1	19,943,000	100.00%	79.93%	1.00	19,943,000	0.00%	101.91%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100.00%	93.21%						
										Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																									
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terbentuknya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat (orang)	8879.00	541,884,125	0.00	-	3952	1,171,892,350		214,096,915		92,129,250		509,187,300		344,091,800	-	1,159,505,265	0.00%	98.94%	8879.00	1,159,505,265		213.98%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan (Bulan)	12.00	541,884,125	0.00	-	500	1,171,892,350	125	214,096,915	125	92,129,250	125	509,187,300	125	344,091,800	500	1,159,505,265	100.00%	98.94%	500.00	1,159,505,265	4166.67%	213.98%		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0.00	541,884,125	0.00	-	500	1,171,892,350	125	214,096,915	125	92,129,250	125	509,187,300	125	344,091,800	500	1,159,505,265	100.00%	98.94%	500.00	1,159,505,265	0.00%	213.98%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100.00%	98.94%						
										Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partai Politik Yang Berperan Dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	100.00	1,246,036,051	0.00	-	100	14,125,187,000		12,070,000		1,897,736,000		634,152,000		11,217,050,000		13,761,908,000	0.00%	97.42%	100.00	13,761,908,000		1104.38%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan parpol mengikuti pemilihan umum (%)	100.00	1,246,036,051	0.00	-	100	14,125,187,000		12,070,000	50	1,897,736,000	50	634,152,000		11,217,050,000	100	13,761,908,000	100.00%	97.42%	100.00	13,761,908,000	100.00%	1104.38%		
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0.00	1,246,036,051	0.00	-	100	14,125,187,000		12,070,000	50	1,897,736,000	50	634,152,000		11,217,050,000	100	13,761,908,000	100.00%	97.42%	100.00	13,761,908,000	0.00%	1104.38%		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	97.42%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat (%)	60.00	-	0.00	-	60	234,895,500		31,515,333		166,495,500		1,200,000		4,500,000	-	203,710,833	0.00%	86.72%	60.00	203,710,833		0.00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terbitnya rekomendasi dari SKT Ormas, LSM, Yayasan dan Paguyuban di wilayah Kota Palangka Raya (SKT)	30.00	-	0.00	-	30	234,895,500	13	31,515,333	10	166,495,500	7	1,200,000	-	4,500,000	30	203,710,833	100.00%	86.72%	30.00	203,710,833	100.00%	0.00%		
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0.00		0.00	-	20	234,895,500	13	31,515,333	5	166,495,500	1	1,200,000	1	4,500,000	20	203,710,833	100.00%	86.72%	20.00	203,710,833	0.00%	0.00%		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	86.72%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi Sosial dan Budaya (Dokumen)	45.00	365,704,689	0.00	-	45	250,786,000		2,114,000		47,695,000		34,900,000		152,657,940	-	237,366,940	0.00%	94.65%	45.00	237,366,940		64.91%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan hasil pemantauan ekonomi kegiatan rapat FKUB dan FKGN (%)	100.00	365,704,689	0.00	-	6	250,786,000	2	2,114,000	2	47,695,000	2	34,900,000	-	152,657,940	6	237,366,940	100.00%	94.65%	6.00	237,366,940	6.00%	64.91%		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	0.00	365,704,689	0.00	-	16	250,786,000	5	2,114,000	4	47,695,000	2	34,900,000	2	152,657,940	16	237,366,940	100.00%	94.65%	16.00	237,366,940	0.00%	64.91%		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	94.65%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial (%)	16.00	677,263,751	0.00	-	16	1,227,759,155		177,416,838		106,994,890		580,966,427		324,004,800		1,189,402,955	0.00%	96.88%	16.00	1,189,402,955		175.62%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politic	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan rapat Forkopimda, kewaspadaan dini dan penanganan terpadu konflik sosial (rapat)	4.00	677,263,751	0.00	-	4	1,227,759,155	1	177,416,838	1	106,994,890	1	580,966,427	1	324,004,800	4	1,189,402,955	100.00%	96.88%	4.00	1,189,402,955	100.00%	335.22%		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	0.00	279,380,938	0.00	-	60	375,804,500	20	2,500,000	15	81,159,308	10	23,079,192	15	233,684,800	60	340,423,300	100.00%	90.59%	60.00	340,423,300	0.00%	121.85%		
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	397,582,813	0.00	-	4	851,954,655	1	174,916,838	1	25,835,582	1	557,907,235	1	90,320,000	4	848,979,655	100.00%	99.65%	4.00	848,979,655	0.00%	213.37%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	96.88%						
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
									21,342,191,077	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										100.00%	96.47%						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya dari tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik bagi Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Aparatur yang telah memahami pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini mengandung pengertian bahwa Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya sebagai lembaga teknis Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya di bidang kesatuan bangsa dan politik, memiliki tugas untuk menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab.

2. Meningkatnya peran serta masyarakat madani (civil society) di bidang pemahaman dan kemampuan komponen masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi di Kota Palangka Raya, terutama dikalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di Kota Palangka Raya

3. Terselenggaranya pengembangan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Palangka Raya, Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai budaya luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kota Palangka Raya dalam kondisi yang heterogen (suku, agama, ras, dan antar golongan), dan Penanaman nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara demi NKRI.

Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palangka Raya

No	Indikator	SPM/Stan dan Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***
1	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya			30	35	40	45	4	4	40	45	
2	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan			20	30	40	50	32	18	40	50	
3	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama			46	20	25	30	6	10	30	35	
4	Persentase capaian kinerja pencegahan			92%	94%	96%	97%	99%	92%	97%	99%	
5	Tingkat partisipasi pemilih			70%	75%	-	-	77,5%	62,83%	-	-	
6	Indeks Toleransi			43	10	10	10	43	10	10	10	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi pertahanan keamanan yang terus mengalami dinamika.

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kota Palangka Raya dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

1) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan, Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (*law enforcement*) dan peningkatan demonstrasi yang memprotes kebijakan Pemerintah.

2) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus- modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Palangka Raya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah tersusun 5 (lima) program yang terjabar dalam 11 kegiatan dengan 21 sub kegiatan, seperti dibawah ini yang terjabar dalam 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan, sebagai berikut :

Tabel T-C. 31 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKARAYA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**13.347.005.093,00**								
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**13.347.005.093,00**								
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti (Nilai)***	***0***			***B***	**5.253.681.594,00**							-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Angka)*	*18*			*6.000*	125.670.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah perencanaan perangkat daerah yang memadai (Angka)	*18*			*6.000*									
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*				*6.00*	125.670.000,00 *125.670.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah Yang Memadai (Laporan / Dokumen)*	*12*			*12.000*	3.468.561.594,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*				*30.00*	3.453.561.594,00 *3.453.561.594,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*				*12.00*	15.000.000,00 *15.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (%)*	*100%*			*100%*	344.500.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*				*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1.00*	*60.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1.00*	*10.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.500.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)				*2.00*	*14.500.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tamu, dan Masyarakat*			
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan (Paket)				*3.00*	*35.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*2.00*	*15.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*15.00*	*200.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						530.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU perangkat daerah (%)	*100%*			*100%*									
	8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						490.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)				*1.00*	*490.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				*1.00*	*15.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				*2.00*	*25.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						535.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penggunaan produk Dalam Negeri pada Belanja barang dan Jasa (%)	*100%*			*100%*									
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*				*2.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*				*5.00*	435.000.000,00 *435.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN dan Pegawai Honor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD (%)*	*100%*			*100%*	249.950.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*				*7.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memegang kendaraan dinas*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					100.000.000,00 *100.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gadung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguran Lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi (Unit)*				*10.00*	25.000.000,00 *25.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan service Ac, komputer, laptop dan printer*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi (Unit)*				*2.00*	24.950.000,00 *24.950.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa (%)***	***35%***			***35%***	**1.153.952.350,00**							-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah rumusan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa (Angka)*	*4*			*4.000*	1.153.952.350,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)*				*300.00*	1.153.952.350,00 *1.153.952.350,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Masyarakat umum, Forum-Forum, mahasiswa dan pelajar di Kota Palangka Raya*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik (%)***	***100%***			***100%***	**4.049.285.149,00**							-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik (Angka)* *Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik (Angka)*	*18* *10*			*18.000* *10.000*	4.049.285.149,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						4.049.285.149,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)				*10.00*	*4.049.285.149,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik*			
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas (%)***	***12%***			***12%***	**1.234.895.500,00**							**-**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas (Angka)*	*16*			*16.000*	1.234.895.500,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas (Angka)	*45*			*45.000*									
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)*				*12.00*	1.234.895.500,00 *1.234.895.500,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ormas, LSm, Yayasan dan Paguyuban*			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***1. Jumlah kegiatan FKUB 2. persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar (Angka)***	***12***			***12.000***	**153.586.000,00**							**-**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya (Angka)*	*12*			*12.000*	153.586.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya (Angka)	*18*			*6.000*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)*				*6.00*	153.586.000,00 *153.586.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, FKUB, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar di Kota Palangka Raya*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya (%)***	***75%***			***75%***	**1.501.604.500,00**							-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial (Angka)* *Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial (Angka)*	*9* *12*			*3.000* *4.000*	1.501.604.500,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)*				*4.00*	201.604.500,00 *201.604.500,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*				*4.00*	1.300.000.000,00 *1.300.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Forkopimda Kota Palangka Raya*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	JUMLAH	13.347.005.093,00		-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1) Tujuan :

   a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

2) Sasaran :

   a. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat

3.2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, Berdasarkan hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya2008-2028 dengan Visi **"TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG"**

Untuk mendukung tercapainya visi dan terselenggaranya misi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya menetapkan visi ***"Garda Depan Memperkokoh Wawasan Kebangsaan, Pembauran Dan Kewaspadaan Daerah Berbasis Falsafah Hidup Budaya Huma Betang"***, dengan misi :

1. Meningkatkan pemahaman kearifan budaya lokal dengan mengedepankan hidup damai, kebersamaan, keberagaman, kesetaraan, toleransi, musyawarah dan mufakat
2. Menjadi acuan dalam mengembangkan nilai kepatuhan dalam tata kelola pemerintahan yang baik
3. Menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang nyaman untuk berkarya dan berprestasi

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya telah menyusun program dan kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel T-C. 33, sebagai berikut :

Tabel T-C. 33

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKARAYA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**13.347.005.093,00**								
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**13.347.005.093,00**								
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti (Nilai)***	***0***			***B***	**5.253.681.594,00**							-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Angka)*	*18*			*6.000*	125.670.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah perencanaan perangkat daerah yang memadai (Angka)	*18*			*6.000*									
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*				*6.00*	125.670.000,00 *125.670.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah Yang Memadai (Laporan / Dokumen)*	*12*			*12.000*	3.468.561.594,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*				*30.00*	3.453.561.594,00 *3.453.561.594,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*				*12.00*	15.000.000,00 *15.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (%)*	*100%*			*100%*	344.500.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*				*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1.00*	*60.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1.00*	*10.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.500.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)				*2.00*	*14.500.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tamu, dan Masyarakat*			
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*3.00*	*35.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*2.00*	*15.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*15.00*	*200.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						530.000.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU perangkat daerah (%)	*100%*			*100%*									
	8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						490.000.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)				*1.00*	*490.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				*1.00*	*15.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				*2.00*	*25.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						535.000.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penggunaan produk Dalam Negeri pada Belanja barang dan Jasa (%)	*100%*			*100%*									
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*2.00*	*100.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						435.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				*5.00*	*435.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN dan Pegawai Honor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						249.950.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD (%)	*100%*			*100%*									
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*7.00*	*100.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memegang kendaraan dinas*			
	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					*100.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gadung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*10.00*	*25.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan service Ac, komputer, laptop dan printer*			
	8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.950.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*2.00*	*24.950.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*			
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**1.153.952.350,00**							-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa (%)	***35%***			***35%***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah rumusan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa (Angka)*	*4*			*4.000*	1.153.952.350,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)*				*300,00*	1.153.952.350,00 *1.153.952.350,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Masyarakat umum, Forum-Forum, mahasiswa dan pelajar di Kota Palangka Raya*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik (%)***	***100%***			***100%***	**4.049.285.149,00**							**-**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fastlitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik (Angka)* *Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik (Angka)*	*18* *10*			*18.000* *10.000*	4.049.285.149,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						4.049.285.149,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)				*10.00*	*4.049.285.149,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik*			
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas (%)***	***12%***			***12%***	**1.234.895.500,00**							-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas (Angka)*	*16*			*16.000*	1.234.895.500,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas (Angka)	*45*			*45.000*									
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)*				*12.00*	1.234.895.500,00 *1.234.895.500,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ormas, LSm, Yayasan dan Paguyuban*			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***1. Jumlah kegiatan FKUB 2. persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar (Angka)***	***12***			***12.000***	**153.586.000,00**							-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya (Angka)*	*12*			*12.000*	153.586.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya (Angka)	*18*			*6.000*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)*				*6.00*	153.586.000,00 *153.586.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, FKUB, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar di Kota Palangka Raya*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya (%)***	***75%***			***75%***	**1.501.604.500,00**							-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial (Angka)*	*9*			*3.000*	1.501.604.500,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial (Angka)	*12*			*4.000*									
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)*				*4.00*	201.604.500,00 *201.604.500,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*				*4.00*	1.300.000.000,00 *1.300.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Forkopimda Kota Palangka Raya*		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	JUMLAH	13.347.005.093,00		-	

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PALANGKARAYA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**39.166.578.376,00**	**37.826.578.376,00**	**37.226.578.376,00**	**-1.940.000.000,00**							**39.918.160.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**39.166.578.376,00**	**37.826.578.376,00**	**37.226.578.376,00**	**-1.940.000.000,00**							**39.918.160.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**39.166.578.376,00**	**37.826.578.376,00**	**37.226.578.376,00**	**-1.940.000.000,00**							**39.918.160.000,00**	
1	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti**				**-**	**100 %**	**4.484.022.876,00**	**5.232.354.244,00**	**4.632.354.244,00**	**480.977.124,00**							**4.965.000.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah perencanaan perangkat daerah yang memadai*				-	6 Dokumen	100.000.000,00	84.940.000,00	84.940.000,00	-15.060.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	100.000.000,00	84.940.000,00	84.940.000,00	-15.060.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah Yang Memadai*				-	100 %	2.950.022.876,00	3.685.022.876,00	3.085.022.876,00	135.000.000,00			-	- -	-		3.120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30.00 Orang/bulan	30.00 Orang/bulan	2.935.022.876,00	3.670.022.876,00	3.070.022.876,00	135.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya urusan administrasi umum prangkat daerah*				-	100 %	269.000.000,00	403.330.792,00	403.330.792,00	134.330.792,00			-	- -	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	19.997.200,00	19.997.200,00	9.997.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	45.000.000,00	35.461.492,00	35.461.492,00	-9.538.508,00	Kota Palangkaraya. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	9.997.100,00	9.997.100,00	-2.900,00	Kota Palangkaraya. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	14.000.000,00	43.275.000,00	43.275.000,00	29.275.000,00	Kota Palangkaraya. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	30.000.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	4.600.000,00	Kota Palangkaraya. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.00 Laporan	15.00 Laporan	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	Kota Palangkaraya. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianyabarang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan*				-	100 %	485.000.000,00	204.419.576,00	204.419.576,00	-280.580.424,00			-	- -	-		485.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kota Palangkaraya. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	15.000.000,00	109.213.100,00	109.213.100,00	94.213.100,00	Kota Palangkaraya. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	20.000.000,00	95.206.476,00	95.206.476,00	75.206.476,00	Kota Palangkaraya. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersediarya jasa penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	495.000.000,00	666.787.000,00	666.787.000,00	171.787.000,00			-	- -	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	95.000.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00	4.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	400.000.000,00	567.287.000,00	567.287.000,00	167.287.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang dan bangunan gedung kantor*				-	100 %	185.000.000,00	187.854.000,00	187.854.000,00	2.854.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7.00 Unit	7.00 Unit	100.000.000,00	106.890.000,00	106.890.000,00	6.890.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	45.000.000,00	45.784.000,00	45.784.000,00	784.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	10.00 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	20.000.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00	-4.820.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa**				-	**100 %**	**800.000.000,00**	**1.435.903.000,00**	**1.435.903.000,00**	**100.000.000,00**							**900.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Terlaksananya kegiatan koordinasi di bidang wawasan kebangsaan*				-	300 Orang	800.000.000,00	1.435.903.000,00	1.435.903.000,00	635.903.000,00			-	- -	-		900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300.00 Orang	300.00 Orang	800.000.000,00	1.435.903.000,00	1.435.903.000,00	635.903.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik**				-	**100 persen**	**31.403.160.000,00**	**29.351.659.232,00**	**29.351.659.232,00**	**0,00**							**31.403.160.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Laporan penyaluran dana hibah*				-	10 dokumen	31.403.160.000,00	29.351.659.232,00	29.351.659.232,00	-2.051.500.768,00			-	- -	Partai Politik		31.403.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			10.00 Orang	10.00 Orang	31.403.160.000,00	29.351.659.232,00	29.351.659.232,00	-2.051.500.768,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.403.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas**				-	**12 %**	**1.379.395.500,00**	**505.395.500,00**	**505.395.500,00**	**20.604.500,00**							**1.400.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah laporan Surat Keterangan yang di keluarkan*				-	16 Dokumen	1.379.395.500,00	505.395.500,00	505.395.500,00	-874.000.000,00			-	- -	-		1.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			12.00 Orang	12.00 Orang	1.379.395.500,00	505.395.500,00	505.395.500,00	-874.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar** **Jumlah kegiatan FKUB**				-	**100** **10 %** **Dokumen**	**200.000.000,00**	**275.650.000,00**	**275.650.000,00**	**150.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah laporan*				-	6 Dokumen	200.000.000,00	275.650.000,00	275.650.000,00	75.650.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			6.00 Orang	6.00 Orang	200.000.000,00	275.650.000,00	275.650.000,00	75.650.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah kota Palangka Raya**				-	**75 %**	**900.000.000,00**	**1.025.616.400,00**	**1.025.616.400,00**	**0,00**							**900.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah laporan*				-	4 Dokumen	900.000.000,00	1.025.616.400,00	1.025.616.400,00	125.616.400,00			-	- -	-		900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4.00 Orang	4.00 Orang	200.000.000,00	325.616.400,00	325.616.400,00	125.616.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4.00 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**39.166.578.376,00**	**37.826.578.376,00**	**37.226.578.376,00**	**280.435.299.709,00**							**39.918.160.900,00**	

BAB V. PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen rencana tahunan. Penetapan program dan kegiatan telah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Untuk itu dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2024, masing- masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dan Institusi yang menangani tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota di Kota Palangka Raya berpedoman terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja ini, demi terciptanya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Penyusunan rencana biaya pelaksanaan program dan kegiatan kiranya mempertimbangkan efesiensi secara rasional dan proporsional karena pagu anggaran yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu perlu disusun prioritas program dan kegiatan sesuai aspek-aspek yang dinilai strategis dan urgen.

Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan konsultasi dengan pendekatan secara formal maupun non formal dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.